

PERAN KEPOLISIAN INDONESIA DALAM DIPLOMASI PADA OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN

Arendra Wahyudi^{1*}, Yotanabey Aryanto Mulkan², Ahmad G. Dohamid³

^{*1} fx_arendra@yahoo.com ahmaddohamid@idu.ac.id

¹Universitas Pertahanan, ²Universitas Pertahanan, ³Universitas Pertahanan

*email penulis/koresponden: fx_arendra@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Polri sebagai alat diplomasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian, yang menunjukkan bahwa Polri telah lama aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Polri dalam peacekeeping operations sebagai instrumen diplomasi Indonesia, yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjalankan mandat resolusi DK PBB, serta strategi nasional dalam memaksimalkan peran Polri pada misi perdamaian. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman & Sadana, dengan landasan teori mencakup konsep Diplomasi Pertahanan, Kerja Sama Internasional, dan Peran. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran Polri sebagai instrumen diplomasi dalam peacekeeping operations belum mencapai tingkat partisipasi yang optimal. Polri dapat meningkatkan kontribusinya melalui pengembangan pelatihan dan kapasitas, memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan peran perempuan, membangun infrastruktur yang lebih baik, serta memperkuat peran strategis dan intelektual. Langkah-langkah ini akan membantu Polri berperan lebih aktif dalam menjaga perdamaian global dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kontributor utama di arena internasional.

Kata kunci: Diplomasi, Peacekeeping Operations, Peran, Polisi, Kerjasama

Abstract. This study examines the role of Polri as a diplomatic tool in peacekeeping operations, highlighting its longstanding involvement as part of the UN peacekeeping forces. The aim of this research is to evaluate the role of Polri in peacekeeping operations as a component of Indonesia's diplomatic strategy, which aligns with the Indonesian government's policy to implement the UN Security Council's resolutions and its broader strategic approach to optimizing Polri's role in these missions. The theoretical framework incorporates foreign policy analysis, defense diplomacy, international cooperation, and role theory. Data were analyzed using the Miles, Huberman, & Sadana model. The findings indicate that Polri's participation as a diplomatic instrument in peacekeeping missions has not yet met the anticipated level. However, Polri's role can be further enhanced through increased training and capacity development, bolstering international partnerships, expanding the role of women, improving infrastructure and facilities, and strengthening intellectual and strategic capacities. These steps are essential for Polri to contribute more actively and effectively to UN peacekeeping missions, thus reinforcing Indonesia's standing as a significant player in the global community.

Keywords: Diplomacy, Peacekeeping Operation, Role, Police, Cooperations

1. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan setelah Perang Dunia II, bertujuan menjaga perdamaian dan mencegah konflik global (United Nations, 2018). PBB menyediakan

forum bagi negara-negara untuk berdialog dan bernegosiasi mengenai isu-isu global (Morgenthau, 2010: 546), dengan berbagai mekanisme seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB berperan utama dalam menangani ancaman perdamaian dan memimpin operasi pemeliharaan perdamaian (IIS, 2013: 2), termasuk peacekeeping operations (PKO) yang bertujuan meredakan konflik dan mengelola pasca-konflik (Hutabarat, 2017: 61). Indonesia telah aktif dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB sejak 1957, dimulai dengan Kontingen Garuda I di Sinai, Mesir. Selain prajurit TNI, Indonesia mengirimkan personel Polri dalam misi perdamaian, termasuk melalui skema Individual Police Officers (IPOs). Hingga saat ini, 794 IPO Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai misi PBB di seluruh dunia (Indonesia dan Rekam Jejak di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, 2020). Meskipun Polri telah lama terlibat dalam misi PBB, kontribusi jumlah personelnnya masih tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Bangladesh dan Nepal. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengeksplorasi peran Polri dalam mendukung komitmen Indonesia menjaga perdamaian dunia.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional muncul dari kebutuhan mendasar suatu negara, dipengaruhi oleh kondisi internal seperti politik, ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Faktor-faktor ini membentuk kekuatan negara dalam mencapai pengakuan global dan mencerminkan perilaku negara dalam hubungan internasional melalui kebijakan luar negerinya. Menurut Kindleberger dan Aliber (2005), hubungan antar negara didasarkan pada keunggulan produksi yang memungkinkan spesialisasi, sehingga kerja sama internasional dapat difokuskan pada keunggulan masing-masing negara.

Hans J. Morgenthau menambahkan bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi identitas fisik, politik, dan budaya dari ancaman luar. Dalam konteks Indonesia, kepentingan nasional berfokus pada menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan memperlancar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia menggunakan diplomasi bilateral dan multilateral sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai kepentingan tersebut. Kepentingan nasional mencerminkan identitas, kekuatan, dan aspirasi negara. Dengan memahami konsep ini, negara dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang sejalan dengan tujuan nasional dan memperhatikan dinamika domestik maupun internasional.

Teori Strategi

Secara etimologis, "strategi" berasal dari bahasa Yunani "Stratos" (tentara) dan "Agein/Agos" (memimpin), yang merujuk pada seni seorang jenderal dalam perang, atau "The Art of War." Konsep ini kemudian berkembang sebagai upaya mencapai tujuan, baik melalui tipu muslihat (strategism) maupun taktik militer (A. Yani Antariksa, 2014). Para pemikir seperti Carl von Clausewitz dan Liddell Hart melihat strategi sebagai penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik. Clausewitz menekankan bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, sementara Liddell Hart berfokus pada kecakapan mengarahkan militer untuk tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan politik (Marsono, 2020; Liddell Hart, 2008).

Seiring perkembangan, strategi tidak hanya terbatas pada militer, tetapi mencakup berbagai konteks, termasuk politik, sosial-budaya, dan teknologi (Colin S. Gray, 2007). Strategi juga dapat dilihat sebagai jembatan antara kebijakan dan tindakan nyata, menyediakan panduan dalam mengejar tujuan, sebagaimana dijelaskan oleh Gray (2014). Selain itu, John Boyd memperkenalkan konsep OODA Loop, yang menekankan respons cepat dan adaptasi dalam menghadapi perubahan situasi (Angerman, 2004).

James Mattis, mantan Menteri Pertahanan AS, menyoroti pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam strategi militer modern, dengan memperbarui strategi berdasarkan perubahan ancaman dan teknologi (Mattis, 2008). Strategi modern juga menggabungkan kekuatan non-militer, seperti diplomasi dan ekonomi, sebagai bagian dari strategi besar yang melibatkan seluruh elemen kekuatan nasional. Strategi nasional mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan operasional untuk menghadapi tantangan masa depan.

Analisis Kebijakan Luar Negeri (FPA)

Analisis Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy Analysis atau FPA) menawarkan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana suatu negara membuat dan melaksanakan kebijakan luar negerinya, terutama terkait dengan upaya mencapai kepentingan nasional. Menurut K.J. Holsti (2011), kebijakan luar negeri adalah serangkaian ide dan gagasan yang dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan internasional, sementara konsep kepentingan nasional menekankan pada tujuan utama negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan.

FPA memainkan peran penting dalam menjelaskan bagaimana kepentingan nasional memengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri. Negara mengarahkan kebijakan politik luar negerinya untuk mencapai tujuan seperti pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi

melalui pemahaman mendalam tentang dinamika internal dan eksternal. Dalam konteks ini, analisis FPA mempertimbangkan berbagai aktor yang terlibat, baik di tingkat domestik maupun internasional, serta proses pengambilan keputusan yang kompleks.

Para pemikir seperti Morgenthau, Holsti, Hudson, Lake, dan Smith berkontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang interaksi antara aktor-aktor domestik dan internasional yang membentuk kebijakan luar negeri. K.J. Holsti (2006) menekankan bahwa FPA bertujuan untuk memahami siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan, bagaimana keputusan tersebut dibuat, dan faktor-faktor yang memengaruhi hasilnya. Perspektif ini sangat relevan dalam analisis kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks kontribusi Polri dalam operasi perdamaian internasional.

FPA membantu dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tantangan global. Dengan memahami interaksi antara aktor domestik dan internasional serta berbagai faktor pengaruh, pemerintah dan analis kebijakan dapat mengembangkan strategi yang efektif dan sesuai dengan tujuan nasional. Tulisan ini menggabungkan konsep FPA dan kepentingan nasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran Polri dalam peacekeeping operations dengan pendekatan analitis yang kuat dan berbasis teori terpercaya.

Teori Diplomasi Pertahanan

Dalam konteks mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional, Indonesia menggunakan kebijakan luar negeri yang terfokus pada diplomasi, khususnya diplomasi pertahanan. Diplomasi ini menjadi salah satu metode yang strategis dalam mewujudkan tujuan nasional, termasuk dalam konteks keamanan dan stabilitas wilayah. Seperti yang dinyatakan dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 2, hakikat pertahanan negara adalah upaya semesta yang mengandalkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Namun, keyakinan pada kekuatan sendiri tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan negara lain, dan diplomasi menjadi sarana penting untuk mewujudkan kerjasama ini.

Diplomasi pertahanan memiliki peran penting dalam membangun kerjasama keamanan yang berkelanjutan antar negara. Menurut Mihal Marcel, konsep diplomasi pertahanan mulai menonjol setelah Perang Dingin, sekitar pertengahan 1990-an, sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama di bidang keamanan dan militer. Marcel mencatat bahwa diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperkuat kelembagaan, memperdalam dialog strategis, dan membangun

kepercayaan antar negara melalui kerjasama yang erat dalam keamanan, reformasi militer, dan latihan bersama (Marcel, 2014).

Konsep ini juga diperluas oleh K.A. Muthanna, yang mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai kerjasama berkelanjutan yang bertujuan membangun kepercayaan, mencegah konflik, meningkatkan transparansi dalam hubungan pertahanan, serta memperkuat persepsi atas kepentingan umum (Muthanna, 2011). Dengan kata lain, diplomasi pertahanan adalah alat penting dalam memperkuat hubungan internasional melalui kerjasama di bidang keamanan dan militer. Dalam konteks Indonesia, diplomasi pertahanan meliputi berbagai kegiatan seperti pertukaran aktor pertahanan, latihan militer bersama, serta pengembangan industri pertahanan. Diplomasi pertahanan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tujuan utama:

- 1) *Defense Diplomacy for Confidence Building Measures (CBM)*: Membangun dan menjaga kepercayaan antar negara untuk mencegah konflik dan mempromosikan stabilitas regional maupun global. Kegiatan ini berkontribusi dalam pencegahan dan penyelesaian konflik.
- 2) *Defense Diplomacy for Defense Capabilities*: Melalui bantuan militer, pengadaan alutsista, serta pengembangan kemampuan pertahanan bersama negara lain. Kegiatan ini termasuk dalam pelatihan bersama dan penguatan kemampuan militer.
- 3) *Defense Diplomacy for Defense Industry*: Berfokus pada pengembangan industri pertahanan nasional melalui kerjasama dengan negara lain, baik dalam hal pengadaan alutsista maupun transfer pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan domestik (Kementerian Pertahanan, 2015; Syawfi, 2009).

Melalui pendekatan diplomasi pertahanan ini, Indonesia dapat memperkuat keamanan nasional, meningkatkan kerjasama regional, dan membangun kapabilitas pertahanan yang lebih tangguh. Diplomasi pertahanan juga memainkan peran penting dalam menghilangkan permusuhan dan membangun hubungan yang lebih damai dan stabil di kawasan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif guna memahami fenomena yang dialami subyek, yang antara lain ialah perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2002, p. 6). Metode kualitatif dipilih untuk memberikan analisa yang komprehensif tentang Optimalisasi Peran Polri sebagai Instrumen Diplomasi dalam Peacekeeping operations. Penelitian mengandalkan proses mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Dari data-data yang sudah terkumpul, maka akan dianalisis pola yang ada atau pola yang terbentuk sehingga fenomena tersebut dapat dilihat

secara menyeluruh, dan dapat ditarik kesimpulan dengan jelas. Metode kualitatif dalam penelitian ini dipilih untuk memberikan analisa komprehensif mengenai.

4. Hasil dan Pembahasan

Strategi Optimalisasi Peran Polri dalam Diplomasi Multilateral

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran penting melalui kontribusinya dalam berbagai misi di seluruh dunia. Untuk memaksimalkan peran Polri sebagai instrumen diplomasi dalam *peacekeeping operations*, diperlukan strategi yang lebih terkoordinasi dan holistik. Hans J. Morgenthau, menekankan bahwa kepentingan nasional suatu negara harus menjadi panduan utama dalam kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional, menurut Morgenthau, diartikan sebagai kekuatan nasional yang meliputi kekuatan militer, ekonomi, dan diplomatik. Dalam konteks *peacekeeping operations*, peran Polri dapat dilihat sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat kepentingan nasionalnya melalui diplomasi keamanan dan perdamaian. Indonesia, dengan mengirimkan personel Polri ke berbagai misi perdamaian, tidak hanya berkontribusi terhadap stabilitas global tetapi juga memperkuat posisinya di arena internasional. Keterlibatan aktif dalam *peacekeeping operations* meningkatkan profil Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat kepentingan nasional dalam bentuk peningkatan kekuatan diplomatik dan pengaruh internasional. Dalam rangka mendukung optimalisasi peran Polri dalam konteks diplomasi multilateral, Narasumber dari Kementerian Luar Negeri mengemukakan perlu dibentuknya *Task force* Diplomasi Multilateral. Pembentukan *Task force* Diplomasi Multilateral Kemlu-POLRI merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengoptimalkan peran Indonesia dalam forum-forum multilateral, khususnya terkait dengan *peacekeeping operations* di PBB. *Task force* ini akan beroperasi di tiga front utama: Dewan Keamanan PBB, *Special Committee on Peacekeeping operations* (C34), dan Komite Administrasi dan Manajemen PBB (Komite V). Setiap front memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan dan operasional misi pemeliharaan perdamaian, sehingga keterlibatan aktif dan koordinasi yang baik antara Kemlu dan Polri sangat diperlukan. Di level Dewan Keamanan PBB, *task force* ini akan membantu Indonesia dalam merumuskan dan memperjuangkan posisi-posisi strategis yang relevan dengan kepentingan nasional, terutama terkait dengan misi perdamaian yang melibatkan personel Polri. Dewan Keamanan adalah badan utama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, sehingga peran *task force* ini sangat krusial dalam memastikan

bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kepentingan dan keamanan nasional Indonesia. Di level C34, *task force* akan fokus pada negosiasi dan perumusan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi Polri dalam misi-misi *peacekeeping*. Forum C34 membahas berbagai aspek terkait performa, akuntabilitas, keselamatan, dan keamanan pasukan perdamaian, serta isu-isu terkait perlindungan, tata kelola, dan kemitraan. Dengan keterlibatan aktif dalam C34, Indonesia dapat berkontribusi lebih signifikan dalam perumusan kebijakan yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi *peacekeeping*. Di level Komite V, *task force* akan berperan dalam diskusi mengenai penentuan standar biaya umum penggunaan peralatan pendukung pada misi perdamaian atau *contingent owned equipment* (COE). Komite V bertanggung jawab atas urusan administratif dan anggaran di PBB, sehingga keterlibatan Polri dalam pembahasan COE akan memastikan bahwa kebutuhan di lapangan terpenuhi dengan baik dan kebijakan yang dihasilkan mendukung efektivitas misi perdamaian.

Kebijakan Diplomasi Indonesia dalam Peacekeeping operations

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian atau *peacekeeping operations* di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Partisipasi ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta mempromosikan prinsip-prinsip kerjasama internasional yang damai. Kebijakan diplomasi Indonesia dalam *peacekeeping operations* tidak hanya melibatkan kontribusi personel militer tetapi juga personel dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kebijakan ini didasarkan pada beberapa prinsip utama yang mendasari komitmen Indonesia dalam menjalankan perannya dalam *peacekeeping operations*. Adapun prinsip-prinsip utama Kebijakan Diplomasi Indonesia dalam *Peacekeeping operations* adalah sebagai berikut:

Komitmen terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional

Sebagai anggota PBB, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam misi *peacekeeping* yang bertujuan untuk menstabilkan kawasan konflik, melindungi warga sipil, dan mendukung proses pembangunan perdamaian pasca-konflik.

Indonesia telah mengirimkan ribuan personel ke berbagai misi *peacekeeping* PBB, termasuk MONUSCO (*Democratic Republic of the Congo*), UNIFIL (Lebanon), dan MINUSCA (*Central African Republic*). Partisipasi ini menunjukkan dedikasi Indonesia

terhadap tujuan perdamaian global. Selain personel militer, Indonesia juga mengirimkan personel Polri yang terlibat dalam berbagai tugas, seperti pengendalian massa, keamanan publik, dan pelatihan polisi lokal. Keterlibatan Polri ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung berbagai aspek operasional *peacekeeping*.

Penguatan Kapasitas Nasional

Partisipasi dalam misi *peacekeeping* juga digunakan sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme personel militer dan kepolisian Indonesia. Melalui keterlibatan dalam misi internasional, personel Indonesia mendapatkan pengalaman berharga yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keamanan dan pertahanan dalam negeri. Sebelum diberangkatkan ke misi *peacekeeping*, personel militer dan Polri menjalani pelatihan intensif yang mencakup aspek-aspek teknis, hukum internasional, hak asasi manusia, dan keterampilan bahasa. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka siap menjalankan tugas di lingkungan multinasional. Keterlibatan dalam misi *peacekeeping* memberikan kesempatan bagi personel untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama internasional, dan adaptasi terhadap situasi krisis. Pengalaman ini berkontribusi pada peningkatan profesionalisme dan kapasitas institusi militer dan kepolisian Indonesia.

Implementasi prinsip-prinsip kebijakan Diplomasi dalam Peacekeeping operations

Strategi Koordinasi Antar Lembaga

Implementasi kebijakan diplomasi dalam *peacekeeping operations* memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Polri. Pembentukan *Task force Diplomasi Multilateral Kemlu-POLRI* merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. *Task force* ini berperan dalam merumuskan strategi dan posisi negosiasi Indonesia di forum-forum internasional, seperti Dewan Keamanan PBB, C34, dan Komite V. *Task force* ini bertemu secara reguler untuk menginventarisasi posisi Indonesia dan menyusun panduan negosiasi yang penting di level multilateral.

Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan

Untuk memastikan personel militer dan Polri siap menjalankan tugas di misi *peacekeeping*, Indonesia mengadakan berbagai program pelatihan dan pengembangan

kapasitas. Personel yang akan dikirim ke misi *peacekeeping* menjalani pelatihan pra-penugasan yang komprehensif. Pelatihan ini mencakup aspek teknis, hukum internasional, hak asasi manusia, dan keterampilan bahasa. Indonesia juga menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan untuk personel yang terlibat dalam misi *peacekeeping*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai aspek *operasional peacekeeping*.

Peningkatan Profil Diplomati Melalui Diplomasi Multilateral

Diplomasi multilateral adalah kunci untuk meningkatkan profil diplomati Indonesia di arena internasional. Indonesia memanfaatkan partisipasinya dalam misi *peacekeeping* untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral serta mempromosikan posisi dan kepentingan nasional. Indonesia secara aktif berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan standar internasional terkait pemeliharaan perdamaian. Melalui keterlibatan dalam forum-forum seperti Dewan Keamanan PBB dan C34, Indonesia dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan misi *peacekeeping*. Indonesia mengadopsi pendekatan diplomasi yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum-forum internasional. Diplomasi ini mencakup lobi, negosiasi, dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mendukung upaya perdamaian global.

Keterlibatan aktif dalam misi *peacekeeping* meningkatkan profil diplomasi Indonesia di arena internasional. Hal ini menunjukkan komitmen dan kemampuan Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian global serta memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas internasional. Melalui partisipasi aktif dalam misi *peacekeeping*, Indonesia memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan standar internasional terkait pemeliharaan perdamaian. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mempengaruhi keputusan-keputusan penting yang diambil di forum-forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan Komite Khusus untuk Operasi Perdamaian (C34). Indonesia memanfaatkan partisipasinya dalam misi *peacekeeping* untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain. Diplomasi ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional tetapi juga untuk memperkuat kerjasama internasional dalam rangka menciptakan perdamaian dan stabilitas global.

Kebijakan Strategis dalam Optimalisasi Peran POLRI sebagai instrumen Diplomasi Indonesia pada *peacekeeping operations*

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah aktif berkontribusi dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian sejak tahun 1957. Dalam konteks ini, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya penting tetapi juga strategis. Peran Polri dalam *peacekeeping operations*, terutama melalui *Formed Police Unit* (FPU), telah diakui sangat baik. Namun, untuk mengoptimalkan peran Polri sebagai instrumen diplomasi dalam *peacekeeping operations*, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Dalam konteks politik internasional, peran *peacekeeping operations* tidak hanya berfungsi sebagai upaya menjaga perdamaian dan keamanan global, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang memperkuat posisi negara di kancah internasional. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Salah satu elemen kunci dalam kontribusi ini adalah keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam berbagai operasi *peacekeeping* di bawah naungan PBB. Setidaknya terdapat tiga Indikator utama yang menjadikan POLRI sebagai satu kontributor yang sangat diperhitungkan dalam konteks *Formed Police Units* di PBB:

Profesionalisme dan Keahlian Personel Polri

Peran Polri dalam *peacekeeping operations* sangatlah signifikan, terutama dalam kerangka *protection of civilian (POC)* atau perlindungan sipil. Profesionalisme dan keahlian personel Polri merupakan salah satu indikator utama yang menempatkan mereka sebagai kontributor penting dalam misi PBB. Personel Polri, terutama yang berasal dari Brigade Mobil Indonesia, dikenal memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghadapi situasi konflik dan operasi kontra-terorisme. Hal ini didukung oleh berbagai laporan kinerja yang menunjukkan bahwa personel Polri sering menjadi contoh *best practice* dalam Komite Administrasi dan Anggaran PBB (Komite V). Keseriusan Indonesia dalam mengirimkan personel yang kompeten ke misi perdamaian menjadi cerminan dari komitmen diplomatik negara dalam mendukung upaya pemeliharaan perdamaian global. Keahlian teknis dan taktis yang dimiliki oleh personel Polri tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional di lapangan tetapi juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia di forum internasional. Dalam banyak kesempatan, keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas di misi perdamaian sering kali diakui dan dijadikan model oleh negara-negara lain, yang pada akhirnya meningkatkan profil diplomasi Indonesia.

Keselarasan Prinsip dengan Nilai-Nilai PBB

Selain profesionalisme, keselarasan prinsip yang dianut oleh Polri dengan nilai-nilai universal PBB, terutama dalam hal inklusivitas gender, juga merupakan faktor penting dalam diplomasi perdamaian Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam misi perdamaian, sejalan dengan tujuan PBB untuk kesetaraan gender. Komitmen ini tidak hanya meningkatkan efektivitas operasi perdamaian dengan mempromosikan perspektif yang beragam tetapi juga menangani isu-isu spesifik gender di daerah konflik. Dalam prakteknya, Polri telah melakukan langkah-langkah substansial untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam unit penjaga perdamaian mereka. Misalnya, di INDO FPU 2 yang ditempatkan di Republik Afrika Tengah, terdapat 16 petugas perempuan dari total 143 personel. Partisipasi perempuan ini memastikan bahwa tim peacekeeping dapat menangani berbagai situasi dengan lebih baik dan berinteraksi lebih efektif dengan berbagai segmen populasi lokal. Keselarasan nilai inklusivitas gender yang diusung oleh Polri dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh PBB menjadi nilai diplomasi tersendiri yang sangat unik dan memperkuat keseluruhan diplomasi perdamaian Indonesia.

Kreativitas Program dan Pencapaian Tinggi

Kreativitas dan pencapaian tinggi yang ditunjukkan oleh personel Polri dalam misi perdamaian juga menjadi indikator penting yang memperkuat diplomasi Indonesia. Personel Polri dalam misi perdamaian sering kali menunjukkan kreativitas dalam menghadapi tantangan di lapangan dan mencapai hasil yang luar biasa. Hal ini tidak hanya meningkatkan profil Indonesia secara internasional tetapi juga menjadi aset diplomasi yang sangat berharga. Beberapa contoh program dan pencapaian Polri di misi perdamaian antara lain:

Patroli Malam: Unit “Jaga Malam” melakukan patroli malam secara rutin di daerah-daerah berisiko tinggi di Bangui, Republik Afrika Tengah. Patroli ini menyediakan keamanan dan stabilitas di wilayah yang terkena dampak konflik, membantu mencegah kegiatan kriminal, dan memastikan keselamatan penduduk setempat. Unit ini dikenal sebagai unit percontohan yang sangat baik dan prominen.

Community Engagement: Dengan kemampuan komunikasi yang tinggi, FPU Indonesia dari Polri mampu berinteraksi dengan komunitas lokal. Polri telah membangun kepercayaan dan kerjasama dengan penduduk setempat, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas upaya penjaga perdamaian mereka.

5. Kesimpulan dan Saran

Sejak tahun 1957, partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB telah menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung kepentingan nasional, terutama dalam hal diplomasi keamanan dan perdamaian. Dengan menempati peringkat keenam sebagai negara penyumbang pasukan terbesar dalam MPP PBB hingga Juni 2024, Indonesia mengirimkan 2.715 personel, termasuk 183 wanita, ke delapan misi perdamaian di berbagai wilayah dunia. Ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga stabilitas global sekaligus memperkuat pengaruh diplomatiknya di ranah internasional.

Selain kontribusi personel, Indonesia juga berperan aktif dalam memberikan kontribusi intelektual untuk mengembangkan MPP PBB. Sebagai contoh, Indonesia menjadi salah satu perumus Action for Peacekeeping (A4P) dan menginisiasi Resolusi DK PBB 2538 (2020), yang berfokus pada pentingnya peran perempuan dalam misi perdamaian. Lebih dari itu, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum, seperti Special Committee on Peacekeeping Operations (C34), menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan tata kelola dan efektivitas misi perdamaian.

Pledge Indonesia pada UN Peacekeeping Ministerial 2023 untuk menambah 865 personel selama dua tahun ke depan, serta program capacity building, seperti pelatihan Protection of Civilians dan Senior Mission Leaders Training, memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam perdamaian global. Inisiatif lain yang menonjol adalah komitmen untuk memajukan agenda Women, Peace, and Security melalui pelatihan internasional di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI dan Polri.

Terkait isu Gaza, Indonesia menunjukkan kepatuhannya terhadap proses internasional dengan menunggu mandat dari Dewan Keamanan PBB sebelum mengirimkan pasukan. Hal ini menegaskan pendekatan diplomatik yang matang dan berbasis hukum internasional dalam setiap kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan peran signifikan Polri sebagai instrumen diplomasi dalam MPP PBB. Dengan kontribusi personel, inisiatif penguatan kapasitas, dan partisipasi aktif dalam forum multilateral, Polri menjadi aktor kunci dalam mendukung misi perdamaian global. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk terus meningkatkan peran dan kontribusinya di panggung internasional, serta memperkuat posisinya sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan keamanan global.

Daftar Pustaka

- Ahlat, Ümit. (2015). *Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for Military Decision Making. Turkish Army War College: Istanbul-TURKEY.*
- Angerman, W. S. (2004). *Coming Full Circle with Boyd's OODA Loop Ideas: An Analysis of Innovation Diffusion and Evolution.* <https://scholar.afit.edu/etd/4085>
- Amrulloh, M. H., Purwanto, S., Hutajulu, B., & Siagian, F. (2025). Strategi Kodam XVII/Cenderawasih dalam Pemenuhan Personel guna Mendukung Kesiapan Operasi di Papua. *Sparta Multidisciplinary Journal*, 1(1), 16-32.
- Amalia, F. S., Mahroza, J., Halkis, M., Priyanto, P., Purwanto, S., Gunawan, R., ... & David, L. (2024). Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia untuk Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
- Benzaghta, M. A., Elwalda, A., Mousa, M., Erkan, I., & Rahman, M. (2021). SWOT analysis applications: An integrative literature review. *Journal of Global Business Insights*, 6(1), 55–73. <https://doi.org/10.5038/2640-6489.6.1.1148>
- Bilgin, P. (2008). Book Review: Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007, 225 pp., \$21.21 pbk.). *Millennium*, 37(1), 227-228. <https://doi.org/10.1177/03058298080370011111>
- Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. (2020). *POST-QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH METHODS*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermansah, F., Mahroza, J., Halkis, M., Prakoso, L. Y., Purwanto, S., Sutanto, R., ... & David, L. (2024). Diplomasi Pertahanan Indonesia Afganistan dalam Penyelesaian Perdamaian Tahun 2018-2023.
- Lawrence, Neuman, W. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Edisi 7. Jakarta: Indeks.
- Lake, D. A. (2011). Why “isms” Are Evil: Theory, Epistemology, and Academic Sects as Impediments to Understanding and Progress. *International Studies Quarterly*, 55(2), 465–480. <http://www.jstor.org/stable/23019696>
- Koentjaraningrat. (1993) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Huntington, S. P. (2000). *The Soldier and the State (15th ed.)*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

-
- Mahroza, Jonni. (2021). *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Bidang Pertahanan*. Jakarta: UNHAN Press.
- Mas'ood, M. (1994). *Dalam Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (hal. 34). Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Morgenthau, Hans J. (1973). *Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace*, New York: Knopf, 5th edition.
- Mattis, J. N. (2008). USJFCOM Commander's Guidance for Effects-based Operations. The US Army War College Quarterly: Parameters, 38(3). <https://doi.org/10.55540/0031-1723.2437>
- Morgenthau, Hans J. (n.d.). (1962). A POLITICAL THEORY OF FOREIGN AID*. *The American Political Science Review*, Vol. 56, No. 2 (Jun., 1962), pp. 301-309. American Political Science Association.
- Purwanto, S., & Ilhamsyah, I. (2025). Army Human Resources Development Strategy through Human Capital Approach. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(1), 1-22.
- Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. Human Resource Development Strategies for Enhancing Organizational Performance in the Digital Era.
- Sitepu, P. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Smith, Adam (2003) *The Wealth of Nation*. New York: Bantam Dell.
- Sorensen, R. J. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Retika Aditama.
- Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. (2010). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sukmawati S, S. (2020). Effects of Recruitment, Leadership, and Local Culture on Discipline and Performance of Garuda Contingent Soldiers in Lebanon. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 606-618.
- Smith, Keith (2014). Realist Foreign Policy Analysis with a Twist: The Persian Gulf Security Complex and the Rise and Fall of Dual Containment. *Foreign Policy Analysis*, (), n/a–n/a. [doi:10.1111/fpa.12084](https://doi.org/10.1111/fpa.12084)
- Smith, S. (1987). Foreign Policy Analysis and International Relations. *Millennium*, 16(2), 345-348. <https://doi.org/10.1177/03058298870160021601>
- Joko Sumaryono. *Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum*, Majalah Patriot, 2007, hlm. 3